

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Deskripsi Teoritis**

#### **2.1.1 Tinjauan Tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

##### **1) Pengertian Internalisasi**

Secara terminologis dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa definisi internalisasi yakni merupakan penghayatan atau proses pemahaman terhadap ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menyadari keyakinan akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Menurut Muhaimin (1996 : 53) “dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, terdapat tahapan prosesi yang harus dilakukan oleh guru dalam menginternalisasi suatu nilai kepada anak asuh atau peserta didik”.

Menurut Muhaimin (1996 : 53) dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu:

- a) Tahap Transformasi Nilai : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh.

- b) Tahap Transaksi Nilai : Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.
- c) Tahap Transinternalisasi : Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Melihat sesuai dengan prosesi internalisasi maka dapat dikemukakan kembali bahwa internalisasi adalah suatu proses memasukkan atau mendoktrin suatu sikap, tingkah laku atau lain sebagainya kepada peserta didik yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: tahap transformasi nilai, tahap transaksi nilai dan tahap transinternalisasi.

## 2) Pengertian Nilai

Kata *value* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin *valare* atau bahasa Perancis Kuno *valoir*.

Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu subjek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik

kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Adapun definisi nilai menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Kuperman (2005 :98) “nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif”.

Sedangkan menurut Mulyana (2004 : 9) “nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan”. Kemudian menurut Abdulsyani (2007 : 52) “nilai dapat disebut sebagai ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik dan benar oleh masyarakat luas”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Berdasarkan dengan definisi itu maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Nilai mempunyai beberapa macam makna. Sejalan dengan itu, maka makna nilai juga bermacam-macam. Rumusan yang bisa penulis kemukakan tentang makna nilai itu adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai (berguna) merupakan nilai (baik, benar atau indah) mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap “menyetujui” atau mempunyai sifat nilai tertentu dan memberi nilai, artinya

menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Adapun sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut :

- a) Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia.
- b) Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal.
- c) Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai.

### 3) **Kajian Tentang Pancasila**

Sebagai *main subject* dalam penelitian ini maka Pancasila sangat penting untuk dipahami peserta didik, mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sumber daripada kajian nilai-nilai yang menjadi dasar konsep penulis. Pancasila juga merupakan salah satu dari empat pilar berbangsa dan bernegara selain pemahaman terhadap UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika. Sehingga “untuk mengerti dan memahami arti dan isi dari Pancasila dengan sebenar-benarnya, maka penting untuk mengetahui pengertian Pancasila baik dari segi etimologis, terminologis, dan historis Pancasila” (C.S.T Kansil 2011:14).

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada

pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang.

Pada tahun 1943 posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara Sekutu. Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri **Koyso** menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau **Dokuritsu Zyunbi Tcoshakai** pada 1 Maret 1945.

Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina, satu anggota keturunan Belanda dan satu anggota dari keturunan Arab.

Dalam salah satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia. Di dalam sidang tersebut **Ir. Soekarno** menyampaikan pidatonya dan mengemukakan lima prinsip yang sebaiknya dijadikan dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu:

- a) Kebangsaan Indonesia
- b) Internasionalisme atau perikemanusiaan
- c) Mufakat atau demokrasi
- d) Kesejahteraan sosial
- e) Ketuhanan

**Ir. Soekarno** kemudian menegaskan bahwa kelima alas itu dinamakan Pancasila. Setelah Sidang I BPUPKI berakhir dibentuklah Panitia Kecil atau Panitia Sembilan untuk merumuskan ide dasar negara dengan bahan utama yang telah dibi. carakan dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil bersidang dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta, yaitu:

- a) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia,
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau **Dokuritsu Zyunbi Inkai** pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas semula dari panitia ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serah terima kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun dengan takluknya Jepang kepada Sekutu. maka pada tanggal 14 Agustus terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan yang baik dan sempit itu akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan langkah besar dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan berhasil menetapkan:

- a) Memilih **Ir. Soekarno** dan **Drs. Moh. Hatta** sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
- b) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan UUD 1945 inilah rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara dapat kita temui, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan rumusan sebagai berikut.

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia,
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin dalam Kaelan(2008:21) dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu, “panca” artinya “lima”, dan “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” , serta “syiila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksud adalah istilah “panca syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah ”dasar yang memiliki lima unsur”.

Kaelan (2008:103) mengemukakan bahwa “Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan Negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta

bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia”.Sedangkan menurut Kansil (2002:80) “arti Pancasila sebagai dasar filsafat Negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak ada tempat bagi warga Indonesia untuk pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa Pancasila adalah suatu pegangan atau pedoman bagi bangsa Indonesia yang merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menyatukan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.

#### **4) Nilai-Nilai Pancasila**

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religious atau tidak religious. Sesuatu dikatakan bernilai apabila ia mempunyai kegunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) maupun



mengandung unsur religius (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam Eko Widodo, Taufiqurrahman (2009:9) nilai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Di dalam nilai kerohanian itu sendiri dapat diperinci menjadi empat macam, yaitu:

- a) Nilai kebenaran/kenyataan, yaitu nilai yang bersumber dari pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
- b) Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia.
- c) Nilai kebaikan atau nilai Moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia.
- d) Nilai religius, merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutiak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Menurut (C.S.T Kansil 2011:56) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Dia dzat yang Mahasempurna. Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

- a) Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki.
- f) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

- h) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

## 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut:

- a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (*tepo seliro*).
- d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.

## 3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. *Persatuan* berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak

pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a) Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

#### **4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. *Hikmat kebijaksanaan* mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. *Permusyawaratan* berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan

mufakat. *Perwakilan* berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan Negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah:

- a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
- e) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
- f) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- g) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

## **5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Secara rinci nilai-

nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah:

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.
- c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- d) Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain.
- e) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- f) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- g) Suka bekerja keras.
- h) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- i) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Tujuan yang hendak dicapai dari perumusan Pancasila adalah kualitas manusia Indonesia dan kualitas masyarakat Indonesia yang semakin maju dan berkembang. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila itu adalah memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila supaya dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu

menjadikan manusia dan masyarakat Indonesia berkualitas dan dapat menjadikan Indonesia semakin maju dan berkembang.

## **2.2 Konsep Hierarki Internalisasi Nilai-nilai Pancasila**

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan utuh yang memiliki ciri-ciri :

- a) Suatu kesatuan bagian-bagian.
- b) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
- c) Saling berhubungan dan saling ketergantungan.
- d) Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem).
- e) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, dalam Elly 2005:22).

Menurut Kaelan (2007:9) Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing – masing merupakan suatu azas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan setiap sila merupakan suatu unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Maka dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal (majemuk artinya

jamak) (tunggal artinya satu). Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lainnya.

Sila-sila Pancasila merupakan sistem falsafat pada hakikatnya merupakan kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi sila yang lainnya. Secara demikian ini maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu sistem juga. Hal ini dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilosofan sebagaimana sistem falsafat lainnya.

Kenyataan Pancasila yang demikian disebut *kenyataan objektif*, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila sendiri terlepas dari suatu yang lain, atau terlepas dari pengetahuan orang lain. Kenyataan objektif yang ada terlekat pada Pancasila, sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas berbeda dari dengan sisten filsafat yang lainnya. Oleh karena itu Pancasila sebagai sebagai suatu sistem filsafat akan memeberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada sistem falsafat lainnya.

Susunan Pancasila adalah hierarki dan mempunyai bentuk piramidial. "Pengertian matematika piramidial digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-



sila dari Pancasila dalam urutan-urutan kuantitas dan juga dalam hal sifat-sifatnya kualitas” (Kaelan 2007:10). Jika dilihat dari intinya, urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi dan sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.

Dalam susunan hierarki dan piramidal ini, maka ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila didalamnya mengandung sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungannya hierarki piramidal semestinya.

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarki dan berbentuk piramidal adalah bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa Prima*. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok Negara, karena Negara adalah lembaga kemanusiaan, Negara adalah persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila 2). Maka Negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang

bersatu (Sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur Negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam Negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan kata lain keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup berdama yang disebut Negara.

Berdasarkan pemaparan dan pendapat para ahli diatas maka perlu ada penyederhanaan konsep hierarki dalam proses menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada peserta didik dengan bentuk teori pendekatan moral Blatt dan Kohlberg. Kemudian peneliti dapat melihat pengaruh hubungan konsep hierarki dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan induksi konflik-kognitif terhadap sikap Nasionalismepeserta didik.

### **2.3 Tinjauan Konsep Pendekatan Blatt dan Kohlberg pada Pengembangan Nilai, Sikap dan Moral dalam Internalisasi Nilai - nilai Pancasila.**

Upaya pengembangan nilai, moral dan sikap harus dikembangkan secara efektif lingkungan disekolah. Suatu kelemahan dalam sistem pendidikan nilai kita adalah kita jarang atau hampir tak pernah merumuskan nilai-nilai inti (*core values*) dan fundamental secara rinci dan jelas yang kemudian dijadikan landasan bagi semua praktik pendidikan. (Moh. Ali, 2007:149).

Menurut Blatt dan Kohlberg (dalam psikologi remaja Moh. Ali : 2007) menunjukkan bahwa upaya pedadogis yang lebih terbatas untuk merangsang perkembangan moral dapat juga memiliki dampak yang berarti pada anak. Praktiknya adalah membentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan 10

orang peserta didik, bertemu 2 kali dalam seminggu dalam waktu 1 bulan untuk membahas dilema moral. Kebanyakan peserta didik dalam kelas perkembangan moralnya mengalami perkembangan kemajuan hampir satu tahap penuh.

Prosedur diskusi moral Blatt menggunakan istilah “induksi konflik-kognitif” mengenai masalah-masalah moral dan memberikan keterbukaan terhadap tahap berfikir yang sebenarnya berada di atas tahap berpikir peserta didik.

Prosedur pertama, kurikulum pendidikan moral dipusatkan pada suatu rangkaian dilema moral yang didiskusikan bersama-sama antara peserta didik dan guru. Semua dilema moral yang dipilih adalah yang dapat mencetuskan konflik-kognitif, yaitu rasa tidak pasti mengenai apa yang benar, atau dipilih karena dilema moral dapat menimbulkan perdebatan di kalangan peserta didik.

Prosedur kedua, menimbulkan diskusi antara para murid pada dua tahap perkembangan moral yang berdekatan. Karena para peserta didik berpikir sesuai dengan perbedaan tahap perkembangan moralnya., argumentasi mereka menggunakan juga menjadi berbeda dan bervariasi. Selama diskusi berlangsung, guru mula-mula mendukung dan menjelaskan semua argumentasi yang berada satu tahap di atas tahap perkembangan moral terendah. Pada akhir tahap, semua peserta didik diuji ulang melalui serangkaian tes.

Berdasarkan penjelasan di atas maka implikasi bagi internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah bahwa guru harus serius membantu peserta didik mempertimbangkan berbagai konflik moral terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, memikirkan cara pertimbangan yang digunakan dalam

menyelesaikan konflik moral, melihat ketidakkonsistenan cara berpikir, dan menemukan jalan untuk mengatasinya.

Untuk dapat melaksanakan konsep pendekatan di atas maka guru harus memahami tingkatan berpikir peserta didik dalam berkomunikasi dengan tingkat di atasnya, memusatkan perhatian pada proses bernalar peserta didik, serta membantu peserta didik mengatasi konflik yang dapat mengantarkannya kepada kesadaran akan perkembangan nilai-nilai Pancasila dan sikap Nasionalisme peserta didik akan terbentuk.

## **2.4 Tinjauan tentang Sikap Nasionalisme**

### **2.4.1 Pengertian Sikap**

Sering kali kita mendengar dan berbicara tentang sikap. Hal ini disebabkan karena sikap berkaitan dengan kepribadian dan tingkah laku manusia. Ada bermacam-macam pendapat mengemukakan oleh para ahli psikolog tentang pengertian sikap.

Menurut Roger (2003) dalam Rahman (2013:122), bahasan sikap menjadi konsep kunci dalam psikologi sosial karena sikap dianggap berpengaruh terhadap perilaku sosial dalam berbagai level. Menurutnya, pada level individual, sikap bisa berpengaruh terhadap persepsi, pikiran, perilaku; pada level interpersonal, sikap bisa merupakan elemen kunci yang berpengaruh pada bagaimana kita mengenal dan memperlakukan orang lain; dan pada kelompok (*intergroup*), sikap kita terhadap kelompok sendiri (*ingroup*), dan kelompok lain (*outgroup*) bisa menjadi dasar terjadinya kerja sama atau kelompok antar kelompok.

### 2.4.2 Ciri-ciri Sikap

Sikap merupakan suatu kecenderungan yang dapat mendorong dan menimbulkan perubahan-perubahan atau tingkah laku seseorang terhadap objek tertentu. Meskipun demikian, sikap memiliki segi perbedan dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia, seperti set, kebiasaan, motivasi dan minat.

Abu Ahmadi (2009:164) mengemukakan bahwa: “Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Dapatlah dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap”. Adapun ciri-ciri sikap yakni :

*a) Sikap itu dipelajari (learnability)*

Sikap merupakan hasil belajar ini perlu dibedakan dari motif-motif psikologi lainnya. Misalnya: lapar, haus, adalah motif psikologi yang tidak dipelajari, sedangkan pilihan kepada makanan Eropa adalah sikap.

Beberapa sikap dipelajari tidak sengaja dan tanpa kesadaran kepada sebagian individu. Barangkali yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja bila individu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.

*b) Memiliki kestabilan (Stability)*

Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap, dan stabil, melalui pengalaman. Misalnya: perasaan *like* dan *dislike* terhadap warna

tertentu (spesifik) yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi.

c) *Personal-societal significance*

Sikap melibatkan hubungan seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi.

Jika seseorang merasa bahwa orang lain menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi dirinya, ia erasa bebas, dan *favorable*.

d) *Berisi cognisi dan affeksi*

Komponen cognisi daripada sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya: objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan.

e) *Approach-avoidance directionality*

Bila seseorang memiliki sikap yang *favorable* terhadap sesuatu objek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap yang *unfavorable*, mereka akan menghindarinya.

### 2.4.3 Komponen sikap

Menurut Azwar (2013:23), struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu antara lain:

- a) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.

- b) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.
- c) Komponen perilaku/konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa sikap merupakan sebuah tingkat kecenderungan seseorang yang bersifat positif dan negatif disertai tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap objek tertentu. Sikap seharusnya senantiasa diarahkan kepada sesuatu yang memiliki objek yang jelas karena tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain yang dianggap baik dan buruk.

#### **2.4.4 Aspek Sikap**

Fishbein and Ajzen dalam buku Azwar (2012:28) menyatakan terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan perilaku, yaitu:

- a) Aspek keyakinan terhadap perilaku

Keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Aspek ini merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap dengan kenyataan. Semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya.

b) Aspek evaluasi akan perilaku

Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan perilaku tertentu. Evaluasi atau penilaian ini dapat bersifat menguntungkan dapat juga merugikan, berharga atau tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semakin positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap terhadap objek tertentu, demikian pula sebaliknya.

#### **2.4.5 Fungsi Sikap**

Fungsi sikap menurut Ahmadi (2009: 165) dibagi menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut :

a) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri

Sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menular sehingga mudah pula menjadi sumber bersama. Golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu



obyek. Dengan demikian sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan anggota kelompok yang lain.

b) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku

Sikap seseorang seharusnya konsisten dengan perilaku. Seandainya sikap tidak konsisten dengan perilaku, mungkin ada faktor dari luar diri manusia yang membuat sikap dan perilaku tidak konsisten. Faktor tersebut antara lain adalah sistem nilai yang berada di masyarakat, norma, politik dan budaya.

c) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman

Manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif. Semua pengalaman yang berasal dari dunia luar itu tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu sehingga tidak akan mengganggu.

d) Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian

Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya (individu). Oleh karena itu dengan melihat sikap pada obyek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut.

#### **2.4.6 Pengukuran sikap**

Salah satu aspek yang sangat penting dalam memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (*assessment*) atau pengukuran

(*meansurement*) sipa. Oleh karena itu, masalah pengukuran sikap akan mendapat perhatian khusus dalam pembahasan ini.

Sikap merupakan responden evaluatif yang dapat berbentuk positif maupun negatif. Hal ini berarti bahwa dalam sikap terkandung adanya preferensi atau rasa suka-tidak suka terhadap sesuatu sebagai objek sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap seseorang. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu mengenai obyek sikap yang hendak diungkap.

Pernyataan sikap mungkin berisi atau mengatakan hal-hal yang positif mengenai obyek sikap, yaitu kalimatnya bersifat mendukung atau memihak pada obyek sikap. Pernyataan ini disebut dengan pernyataan yang *favourable*. Sebaliknya pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal negatif mengenai obyek sikap yang bersifat tidak mendukung maupun kontra terhadap obyek sikap. Pernyataan seperti ini disebut dengan pernyataan yang tidak *favourable*.

Dalam buku Azwar (2013: 87) menurut Sax (1980) karangan bukunya yang berjudul *Principles of Educational and Psychological Meansurement and Evaluation*, menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu sebagai berikut:

- a) Sikap mempunyai arah, artinya sikap terbagi pada dua arah kesetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai objek.

- b) Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya tidak berbeda. Dua orang yang sama tidak suka terhadap sesuatu, yaitu sama-sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap negatif yang sama intensitasnya.
- c) Sikap juga memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau tidak dapat setuju terhadap suatu objek mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap.
- d) Sikap juga memiliki konsistensi, artinya kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsnya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperhatikan oleh kesesuaian sikap antara waktu. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam diri individu untuk waktu yang relatif panjang. Sikap sangat cepat berubah, yang labil, tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang inkonsisten.
- Konsistensi dalam bersikap tidak sama tingkatannya pada setiap diri individu dan setiap objek sikap. Sikap yang tidak konsisten, yang tidak menunjukkan kesesuaian antara pernyataan sikap dan perilakunya, atau yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu akan sulit diinterpretasikan dan tidak banyak berarti dalam memahami serta memprediksi perilaku individu yang bersangkutan.
- Harus dibedakan antara pengertian sikap yang tidak konsisten dan pengertian sikap yang tidak memihak. Sikap yang tidak memihak atau netral tetap disebut sikap juga walaupun arahnya tidak positif dan tidak negatif. Orang dapat saja bersikap netral secara konsisten.

e) Sikap yang memiliki spontanitasnya, yaitu menyangkut sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau desakan lebih dahulu agar individu mengemukakannya. Hal ini tampak dari pengamatan terhadap indikator sikap sewaktu individu berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya. Dalam berbagai bentuk skala sikap yang umumnya harus dijawab dengan “setuju” atau “tidak setuju”, spontanitas sikap ini pada umumnya tidak dapat terlihat.

Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap, idealnya harus mencakup kesemua dimensi tersebut. Tentu saja hal itu sangat sulit untuk dilakukan, bahkan mungkin sekali merupakan hal yang mustahil. Belum ada atau mungkin tidak akan pernah ada instrumen pengukuran sikap yang dapat mengungkap kesemua dimensi itu sekaligus.

Banyak diantara skala yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya mengungkapkan dimensi arah dan dimensi intensitas sikap saja, yaitu dengan hanya menunjukkan kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respons individu.

## **2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap**

Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda dan khas terhadap suatu perangsang dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang

datang dari luar (ekstern) maupun dari dalam diri sendiri (intern). Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan. Faktor ini menentukan pilihan seseorang dalam memilih sesuatu yang akan berdampak negatif bagi dirinya atau berdampak positif bagi kehidupannya.
- b) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang yang bersangkutan.

Menurut Azwar (2013:30) diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain:

- a) Pengalaman pribadi

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan emosional.

- b) Pengaruh orang lain yang di anggap penting

Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap searah dengan sikap orang yang di anggap penting. Kecenderungan ini antara lain di motivasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang di anggap penting.

- c) Pengaruh kebudayaan

Tanpa di sadari kebudayaan itu telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggotanya,

karena budayalah yang memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.

d) Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual di sampaikan secara objektif cenderung di pengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

e) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan jika pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

f) Pengaruh faktor emosional

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang di dasari emosional yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

## 2.6 Pengertian Nasionalisme

Nasional berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya.

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu, kesatuan,

kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Semangat kebangsaan adalah sasaran mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dan mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Makna Nasionalisme dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan pada negara
- b) Suatu perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah
- c) Suatu proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa
- d) Suatu gerakan sosial dan politik demi kepentingan bangsa
- e) Suatu doktrin atau ideologi bangsa, baik umum maupun khusus.

Menurut Azra (2011:24) “ Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara dan bangsa atas nama sebuah bangsa”.

Menurut Stanley Benn, sebagaimana di kutip Nurcholis Madjid dalam buku Gatara dan Sofhian (2012:17) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan istilah “nasionalisme” setidaknya ada empat elemen, yaitu:

- a) Semangat ketaatan kepada suatu bangsa (patriotisme),
- b) Dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjukkan kepada kecondongan untuk menutamakan kepentingan bangsa sendiri,
- c) Sikap yang amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan, dan
- d) Nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu.

Berdasarkan pendapat diatas dapat bahwa nasionalisme adalah suatu ungkapan perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia.

Menurut Listyarti (2007:28) Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk antara lain:

- a) Nasionalisme kewarganegaraan yaitu sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh



Jean Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul “*Du Contract Sociale*” (atau dalam Bahasa\_Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

- b) Nasionalisme etnis yaitu sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.
- c) Nasionalisme romantik yaitu bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan Etnis Jerman
- d) Nasionalisme Budaya yaitu sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit dan sebagainya.
- e) Nasionalisme kenegaraan yaitu variasi nasionalisme yang selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis.

Dalam arti sederhana, nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Loyalitas dan pengabdian itu didorong oleh suatu tekad untuk hidup sebagai suatu bangsa dibawah suatu negara yang sama, terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, ataupun golongan.

Rasa nasionalisme ini juga berkaitan dengan etika sosial dan budaya. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kembali kehidupan bangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya

lokal dan nasional serta menyiapkan budaya yang dimaksud untuk mampu melakukan adaptasi dan tindakan proaksi sejalan dengan tuntutan globalisasi. Dengan pengamalan seperti itu, maka rasa nasionalisme akan meningkat, dan itu akan mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang tergolong paling mutakhir dalam pemahaman politik nasional. Dalam puncak pencapaian ide politiknya akan menghasilkan sebuah sistem politik nation state (negara bangsa) sebagai sebuah entitas politik yang kuat di tengah-tengah lingkungan umat manusia di dunia kehidupan ini. Substansi nasionalisme Indonesia memiliki dua unsur. Pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, etnik, dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk pensubordinasian, penjajahan, dan penindasan dari bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam Sumpah Pemuda dan Proklamasi serta dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Hertz dalam Gatara dan Sofhian (2012:20) mengemukakan bahwa kesadaran bernegara dari suatu bangsa atau "*natie*" mengandung empat unsur nasionalisme. Unsur- unsur tersebut adalah:

- a) Hasrat untuk mencapai kesatuan.
- b) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
- c) Hasrat untuk mencapai keaslian.
- d) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang:

- a) Memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan.
- b) Memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan.
- c) Memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama.
- d) Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.
- e) Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.

## **2.7 Prinsip- Prinsip yang Terkandung dalam Nasionalisme Indonesia**

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah dimulai sejak penjajahan Belanda berada di Indonesia. Sejarah perjuangan, pada akhirnya, mencapai puncaknya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus kita perjuangkan dan pertahankan terus.

Apalagi hal-hal berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia dikaji lebih jauh, terdapat prinsip yang juga harus dihayati. Prinsip-prinsip itu ialah prinsip nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsannya itu merupakan bagian dari bagian lain di dunia. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip yaitu kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi/demokratis. Diantaranya yakni :

a) Prinsip kebersamaan

Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b) Prinsip persatuan dan kesatuan

Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial.

c) Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi memandang: bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Kita mencintai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Itu tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realitis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan *Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab*. Oleh karena itu, kita mengakui bahwa semua makhluk di dunia sama dan sederajat, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia sedunia.

### **2.7.1 Lahirnya Nasionalisme Indonesia**

Nasionalisme murni Indonesia mungkin lahir di antara kelompok mahasiswa Indonesia baik yang ada di negeri Belanda maupun yang ada di Indonesia pada tahun 20-an. Mereka menyadari bahwa ideologi agama maupun Marksisme tidak akan mampu menggerakkan seluruh rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kesadaran ini melahirkan Partai Nasional Indonesia (1927) yang didirikan oleh Ir. Soekarno dan merupakan pelopor kesadaran serta perjuangan nasional yang didukung oleh semua pihak. Walaupun PNI ini dilarang tiga tahun kemudian dan disusul oleh bermacam-macam partai dan perhimpunan yang terpaksa lebih moderat, namun perumusan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan penuh (1949).

Setelah kegagalan ideologis pada tahun 1965, timbullah bentuk nasionalisme di Indonesia yang lebih realitis untuk membangun kembali cita-cita nasional terutama dalam bidang tata ekonomi dan struktur sosial. Tujuan pembangunan

nasional itu dirumuskan dalam GBHN dan Repelita-Repelita. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan pembangunan itu telah dirasakan oleh masyarakat.

Di dalam buku Kasil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil (2011:201) bahwa dapat dikatakan, ada berbagai bentuk dan ekspresi nasionalisme. Bila salah satu cita-cita hilang, belum pasti nasionalisme sendiri juga hilang. Semangat nasionalisme yang terwujud dari dalam perjuangan fisik, aksi, pidato bersemangat, tindakan spektakuler, belum pasti lebih besar kadarnya daripada nasionalisme dengan bekerja tekun, membela keadilan, menciptakan tempat kerja, memajukan mutu pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Situasi lain menuntut jawaban lain. Bukan perkataan, melainkan perbuatanlah yang membuktikan ikhlasnya semangat. Setiap bentuk nasionalisme diuji oleh sejarah menuntut tujuan, usaha nyata, kejujuran dan akibatnya untuk seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa tantangan bagi nasionalisme Indonesia ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah negara kebangsaan yang bersifat liberal-demokratis di mana hak-hak dasar setiap warga negara diakui, dihormati, dan dijamin, di mana hukum ditegakkan secara pasti dan adil, di mana negara mewujudkan kesejahteraan umum, dan sebagainya. Sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan hal yang sangat penting. Karena akan membawa kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

### **2.7.2 Membangun Karakter (*Character Building*)**

Dari segi bahasa, membangun karakter (*Character building*) terdiri dari dua kata yakni Membangun (*to build*) dan karakter (*character*). Adapun artinya

"Membangun" bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, mengadakan sesuatu. Sedangkan "Karakter" adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam konteks disini adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak mulia, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa membangun karakter akan menggambarkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- a) Merupakan suatu proses yang terus menerus di lakukan untuk membentuk, tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan kebersamaan.
- b) Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- c) Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai - nilai falsafah Pancasila.

Berkaitan dengan hal itu, maka atas karakter suatu bangsa/masyarakat pada dasarnya dapat dikenali pada dua sifat, yaitu:

- a) Karakter yang bersifat positif, yakni suatu tabiat, watak yang menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat, bengbangsa dan bernegara.

- b) Karakter yang bersifat negatif, yakni tabiat, watak yang menunjukkan nilai-nilai negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swadaya/usaha dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa karakter manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita perjuangan guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Dikatakan penting karena karakter mempunyai makna atau nilai yang sangat mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai yang dimaksud adalah; kejuangan, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solider, sopan santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, tanggung jawab.

Nilai-nilai seperti ini tampaknya cenderung semakin luntur dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa misalnya berbagai kasus konflik sosial dan komunal yang marak terjadi di berbagai daerah dengan penyebab yang sepele. Konflik horizontal antar etnik atau konflik yang membawa isu SARA yang mencerminkan ketidakkukuhan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Seandainya kekukuhan nilai, senantiasa terwujud dalam kehidupan setiap insan manusia Indonesia, maka konflik yang banyak merenggut itu tentu tidak akan terjadi.



Selain itu keironian yang terjadi hari ini adalah kaum yang terpelajar pun sedang marak terjadi tawuran baik itu dikalangan pelajar maupun dikalangan mahasiswa yang tidak sedikit merenggut nyawa disesama mereka dan terus merembes kehidupan masyarakat kita. Bulan sekarang sedang ramainya dengan "Geng Motor" yang makin hari makin tak terkendali penyebaran dan kriminalitas yang ditimbulkannya, dengan rata - rata anggotanya adalah para remaja dan pemuda yang seharusnya diharapkan memiliki karakter terdidik dan jiwa kepemimpinan dalam hal yang baik untuk kemajuan dirinya dan bangsanya. Meihat pada kejadian-kejadian tersebut nampaknya wawasan kebangsaan sudah tidak menjiwai watak manusia Indonesia sebagiannya yang mana pada saat itu masyarakat kita dikenal dengan kesantunan dan keramah tamahan serta penuh toleransi, saling menghormati di dalam kemajemukan masing-masing dan hidup secara bergotong royong.

Mengingat karakter suatu masyarakat, bangsa dan negara mempunyai nilai dan makna yang sangat strategis, maka faktor-faktor yang perlu dan senantia diperhatikan antara lain: Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, normatif (Hukum dan peraturan perundangan), pendidikan, lingkungan, kepemimpinan.

## **2.8 Kerangka Pikir**

Konsep hierarki Pancasila dalam Internalisasi nilai-nilai Pancasila itu adalah memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pendekatan-pendekatan yang mampu diterima oleh peserta didik agar dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri oleh peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan mempunyai misi untuk menjadikan peserta didik menjadi warga Negara yang mengerti dan taat terhadap peraturan pemerintah dan dapat bersosialisai dengan baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat serta meningkatkan kualitas, mutu dan kualitas pribadi peserta didik.

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir**

